

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RENJA) K/L
BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2023**

UKE (Unit Kerja Eselon)	Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator Komponen Input	Volume / Target	Satuan	Pagu Anggaran TA. 2023	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	115.CQ	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI				94.061.138.000	
PROVINSI & Kab/Kota	5245	TEKNIK PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILU OLEH BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA				1.628.256.000	
	5245.BAH	Pelayanan Publik Lainnya		1	Layanan, Bidang, Dokumen, Bulan	324.660.000	
	5245.BAH.001	Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota		1	Layanan, Bidang, Dokumen, Bulan	324.660.000	
		Komponen Input :					
Provinsi		201 Pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran (Provinsi)	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran	1	Laporan	45.000.000	1. Laporan pembinaan/pendampingan ke kab/kota semesteran 2. laporan penyelenggaraan penanganan pelanggaran
Provinsi		202 Pembinaan/pelaksanaan penyelesaian sengketa proses (Provinsi)	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	1	Laporan	45.000.000	1. Laporan pembinaan/pendampingan ke kab/kota semesteran 2. laporan penyelenggaraan penyelesaian sengketa proses
kab/kota		301 Koordinasi penanganan pelanggaran (Kab./Kota)	Jumlah laporan semesteran penyelenggaraan penanganan dan penindakan pelanggaran.	9	Laporan	117.330.000	1. Laporan koordinasi kab/kota semesteran
kab/kota		302 Koordinasi penyelesaian sengketa proses (Kab./Kota)	Jumlah laporan semesteran penyelenggaraan penyelesaian sengketa proses	9	Laporan	117.330.000	1. Laporan koordinasi kab/kota semesteran
	5245.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		1	Lembaga, Unit Kerja, Tim	13.944.000	
RPJMN	5245.BDB.001	Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif		1	Lembaga, Unit Kerja, Tim	13.944.000	
		Komponen Input :					
Provinsi		201 Pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif (Provinsi)	Jumlah daerah yang mengembangkan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif	1	Daerah	13.944.000	34 provinsi + 18 satker K/K baru
	5245.BKC	Pemantauan Lembaga		1	Laporan	1.289.652.000	
	5245.BKC.001	Laporan Hasil Pencegahan/ Pengawasan Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota		1	Laporan	1.289.652.000	
		Komponen Input :					
Provinsi		201 Pengawasan pemilu partisipatif (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan pemilu partisipatif	1	Laporan	33.740.000	1 laporan@34 provinsi
Provinsi		202 Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Provinsi)	Jumlah laporan semesteran fasilitasi dan koordinasi menghadiri undangan Bawaslu RI dan Instansi terkait	1	Laporan	350.000.000	laporan semester
Provinsi		203 Evaluasi pelaksanaan pengawasan (Provinsi)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan pengawasan	1	Laporan	9.560.000	
Provinsi		204 Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan (Provinsi)	Jumlah kegiatan pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan	1	Laporan	44.640.000	- IDI variabel Hak Memilih & Dipilih (Indikator Nomor 11); - laporan triwulan
Provinsi		205 Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas (Provinsi)	Jumlah fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas	1	Laporan	16.900.000	- IDI variabel Hak Memilih & Dipilih (Indikator Nomor 12)
kab/kota		301 Pengawasan pemilu partisipatif (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan pemilu partisipatif	9	Laporan	170.920.000	1 laporan@514 KK
kab/kota		302 Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kab./Kota)	Jumlah laporan semesteran fasilitasi dan koordinasi menghadiri undangan Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Instansi terkait	9	Laporan	359.022.000	laporan semester
kab/kota		303 Evaluasi pelaksanaan pengawasan (Kab./Kota)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan pengawasan	9	Laporan	71.380.000	
kab/kota		304 Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan (Kab./Kota)	Jumlah kegiatan pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan	9	Laporan	136.820.000	- IDI variabel Hak Memilih & Dipilih (Indikator Nomor 11); - laporan triwulan

UKE (Unit Kerja Eselon)	Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator Komponen Input	Volume / Target	Satuan	Pagu Anggaran TA. 2023	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
kab/kota		305	Fasilitasi penguatan pemahaman kepemilikan kepada disabilitas (Kab./Kota)	Jumlah fasilitasi penguatan pemahaman kepemilikan kepada disabilitas	9	Laporan	96.670.000 - IDI variabel Hak Memilih & Dipilih (Indikator Nomor 12) -1 laporan@514 KK
	6661	PERENCANAAN, PROGRAM DAN ANGGARAN SERTA PENYUSUNAN PERATURAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU				30.410.902.000	Kegiatan Tahapan Pemilu (PN)
	6661.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		2	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	30.387.302.000	
	6661.QIC.001	Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu		1	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	28.439.927.000	
		Komponen Input :					
Provinsi		201	Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu (Provinsi)	Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu	1	Dokumen	317.200.000
Provinsi		202	Sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu (Provinsi)	Jumlah laporan sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu	2	Laporan	496.230.000
Provinsi		203	Fasilitasi dan pembinaan aparaturnya pengawasan pemilu (Provinsi)	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan aparaturnya pengawasan pemilu	4	Laporan	500.000.000
Provinsi		204	Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif (Provinsi)	Jumlah laporan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif	2	Laporan	127.101.000
Provinsi		205	Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran (Provinsi)	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran	4	Laporan	902.800.000
Provinsi		206	Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa (Provinsi)	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa	4	Laporan	263.590.000
Provinsi		207	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Provinsi)	Jumlah laporan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan	4	Laporan	1.876.800.000 Laporan triwulan kegiatan Ketua dan Seluruh Divisi
Provinsi		208	Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu (Provinsi)		4	Laporan	700.000.000 Laporan triwulan kegiatan Ketua Provinsi
Kabupaten/Kota		301	Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu (Kab./Kota)	Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu	9	Laporan	1.587.816.000
Kabupaten/Kota		302	Sosialisasi dan implementasi peraturan dan non peraturan Bawaslu (Kab./Kota)	Jumlah laporan sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu	18	Laporan	1.869.180.000
Kabupaten/Kota		303	Fasilitasi dan pembinaan aparaturnya pengawasan pemilu (Kab./Kota)	Fasilitasi dan pembinaan aparaturnya pengawasan pemilu	36	Laporan	867.204.000
Kabupaten/Kota		304	Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif (Kab./Kota)	Jumlah laporan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif	18	Laporan	2.881.840.000
Kabupaten/Kota		305	Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran (Kab./Kota)	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran	36	Laporan	4.488.604.000
Kabupaten/Kota		306	Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa (Kab./Kota)	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa	36	Laporan	1.376.964.000
Kabupaten/Kota		307	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kab./Kota)	Jumlah laporan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan	36	Laporan	4.524.215.000 Laporan triwulan kegiatan Ketua dan Seluruh Divisi Kab/Kota
Kabupaten/Kota		308	Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu (Kab./Kota)		36	Laporan	919.188.000 Laporan triwulan kegiatan Ketua Kab/Kota
Kecamatan		401	Fasilitasi dan pembinaan aparaturnya pengawasan pemilu (Kecamatan)	Fasilitasi dan pembinaan aparaturnya pengawasan pemilu	111	Laporan	2.398.525.000
Kecamatan		402	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kecamatan)	Jumlah laporan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan	111	Laporan	2.342.670.000 Laporan kegiatan Ketua dan Seluruh Divisi Kecamatan
	6661.QIC.003	Seleksi Anggota Badan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilu Ad-Hoc		1	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	1.947.375.000	
		Komponen Input :					
Kecamatan		401	Rekrutmen panwaslu desa/kelurahan (Kecamatan)	Jumlah daerah yang melaksanakan rekrutmen pengawas pemilu	1.126	Daerah	1.947.375.000

UKE (Unit Kerja Eselon)	Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator Komponen Input	Volume / Target	Satuan	Pagu Anggaran TA. 2023	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	6661.UAB	Sistem Informasi Pemerintahan		1	Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan	23.600.000	
	6661.UAB.001	Pengembangan Sistem Informasi Bawaslu		1	Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan	23.600.000	
		Komponen Input :					
Provinsi		201 Pengadaan sarpras pendukung sistem informasi (Provinsi)		2	Unit	23.600.000	
Kabupaten/Kota		301 Pengadaan sarpras pendukung sistem informasi (Kab./Kota)		0	Unit	0	
	6662	PENGAWASAN PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PESERTA PEMILU				985.028.000	Kegiatan Tahapan Pemilu (PN)
	6662.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		1	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	985.028.000	
	6662.QIC.001	Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu		1	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	985.028.000	
		Komponen Input :					
Provinsi		203 Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu (Provinsi)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	1	Laporan	331.478.000	
Kabupaten/Kota		303 Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu (Kab./Kota)	Jumlah laporan fasilitasi sentra gakkumdu	9	Laporan	653.550.000	
	6838	PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU OLEH LEMBAGA AD-HOC				42.241.116.000	Kegiatan Tahapan Pemilu (PN)
	6838.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		2.474	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	42.241.116.000	
	6838.QIC.001	Honorarium Pengawas Ad-Hoc		1.237	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	20.899.156.000	
		Komponen Input :					
Kecamatan		401 Honorarium (Kecamatan)		9	Daerah	10.801.188.000	Ketua = 1 org x 6 bln Anggota = 2 org x 6 bln Kasek = 1 org x 6 bln Pelaksana PNS = 2 org x 6 bln Pelaksana Non PNS = 3 org x 6 bln Tenaga pendukung = 2 org x 6 bln
Kelurahan/Desa		501 Honorarium (Kelurahan/Desa)		9	Orang	10.097.968.000	8 bulan
	6838.QIC.002	Operasional Pengawas Ad-Hoc		1.237	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	21.341.960.000	
		Komponen Input :					
Kabupaten/Kota		301 Sewa kendaraan operasional (Kab./Kota)		9	Lembaga	5.844.660.000	(Ketua + Anggota + Kasek) x 12 bulan
Kabupaten/Kota		302 Sewa gedung/ peralatan/ meubelair (Kab./Kota)		9	Lembaga	946.800.000	Sewa Kantor/Ruang Sidang/Gakkumdu = 12 bulan
Kecamatan		402 Sewa gedung/ peralatan/ meubelair (Kecamatan)		9	Daerah	5.520.780.000	6 bulan
Kecamatan		403 Pemeliharaan gedung/ meubelair/ peralatan (Kecamatan)		9	Daerah	0	6 bulan
Kecamatan		404 Pelayanan operasional perkantoran (Kecamatan)		9	Daerah	8.804.520.000	6 bulan
Kelurahan/Desa		502 Penanda Identitas (Kelurahan/Desa)		9	Orang	225.200.000	
	6839	PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH				8.048.883.000	Kegiatan Tahapan Pemilu (PN)
	6839.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		1	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	7.044.553.000	

UKE (Unit Kerja Eselon)	Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator Komponen Input	Volume / Target	Satuan	Pagu Anggaran TA. 2023	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	6839.QIC.001	Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih		1	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	7.044.553.000	
		Komponen Input :					
Provinsi		201 Publikasi dan dokumentasi pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Provinsi)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	1	Laporan	284.400.000	
Provinsi		202 Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan tahap pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih	1	Laporan	154.375.000	
Provinsi		203 Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Provinsi)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	1	Laporan	65.778.000	
Kabupaten/Kota		301 Publikasi dan dokumentasi pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kab./Kota)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	9	Laporan	97.200.000	
Kabupaten/Kota		302 Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan tahap pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih	9	Laporan	1.269.780.000	
Kabupaten/Kota		303 Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kab./Kota)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	9	Laporan	505.710.000	
Kecamatan		401 Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kecamatan)	Jumlah laporan pengawasan tahap pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih	111	Laporan	2.934.210.000	
Kelurahan/Desa		501 Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kelurahan/Desa)	Jumlah laporan pengawasan tahap pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih	1.126	Laporan	1.733.100.000	
	6839.QCE	Penanganan Perkara		1	Perkara, Berkas Perkara	1.004.330.000	
	6839.QCE.001	Penanganan Pelanggaran Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih		1	Perkara, Berkas Perkara	1.004.330.000	
		Komponen Input :					
Provinsi		202 Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	1	Perkara	122.930.000	
Kabupaten/Kota		302 Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	9	Perkara	881.400.000	
	6840	PENGAWASAN PENETAPAN PESERTA PEMILU				3.962.073.000	Kegiatan Tahapan Pemilu (PN)
	6840.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		1	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	1.686.043.000	
	6840.QIC.001	Pengawasan Penetapan Peserta Pemilu		1	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	1.686.043.000	
		Komponen Input :					
Provinsi		201 Publikasi dan dokumentasi pengawasan penetapan peserta pemilu (Provinsi)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	1	Laporan	37.500.000	
Provinsi		202 Pengawasan penetapan peserta pemilu (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan tahap penetapan peserta pemilu	1	Laporan	119.740.000	
Provinsi		203 Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan penetapan peserta pemilu (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan fasilitasi sentra gakkumdu	1	Laporan	118.833.000	
Kabupaten/Kota		301 Publikasi dan dokumentasi pengawasan penetapan peserta pemilu (Kab./Kota)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	9	Laporan	48.600.000	
Kabupaten/Kota		302 Pengawasan penetapan peserta pemilu (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan tahap penetapan peserta pemilu	9	Laporan	659.670.000	
Kabupaten/Kota		303 Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan penetapan peserta pemilu (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan fasilitasi sentra gakkumdu	9	Laporan	701.700.000	

UKE (Unit Kerja Eselon)	Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator Komponen Input	Volume / Target	Satuan	Pagu Anggaran TA. 2023	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	6840.QCE	Penanganan Perkara		1	Perkara, Berkas Perkara	2.276.030.000	
	6840.QCE.001	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Penetapan Peserta Pemilu		1	Perkara, Berkas Perkara	2.276.030.000	
		Komponen Input :					
Provinsi		201 Pengelolaan data penanganan pelanggaran penetapan peserta pemilu (Provinsi)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	1	Berkas Perkara	102.720.000	
Provinsi		202 Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan peserta pemilu (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	1	Perkara	159.110.000	
Provinsi		203 Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses penetapan peserta pemilu (Provinsi)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	1	Perkara	53.760.000	
Kabupaten/Kota		301 Pengelolaan data penanganan pelanggaran penetapan peserta pemilu (Kab./Kota)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	9	Berkas Perkara	600.680.000	
Kabupaten/Kota		302 Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan peserta pemilu (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	9	Perkara	679.880.000	
Kabupaten/Kota		303 Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses penetapan peserta pemilu (Kab./Kota)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	9	Perkara	679.880.000	
	6841	PENGAWASAN PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN				1.591.765.000	Kegiatan Tahapan Pemilu (PN)
	6841.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		1	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	876.355.000	
	6841.QIC.001	Pengawasan Penetapan Jumlah Kursi Dan Penetapan Daerah Pemilihan		1	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	876.355.000	
		Komponen Input :					
Provinsi		201 Publikasi dan dokumentasi pengawasan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Provinsi)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	1	Laporan	90.600.000	
Provinsi		202 Pengawasan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	1	Laporan	167.545.000	
Kabupaten/Kota		301 Publikasi dan dokumentasi penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Kab./Kota)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	9	Laporan	48.600.000	
Kabupaten/Kota		302 Pengawasan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	9	Laporan	569.610.000	
	6841.QCE	Penanganan Perkara		1	Perkara, Berkas Perkara	715.410.000	
	6841.QCE.001	Penanganan Pelanggaran Penetapan Jumlah Kursi Dan Penetapan Daerah Pemilihan		1	Perkara, Berkas Perkara	715.410.000	
		Komponen Input :					
Provinsi		201 Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	1	Perkara	141.130.000	
Kabupaten/Kota		301 Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	9	Perkara	574.280.000	
	6842	PENGAWASAN PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA				5.193.115.000	Kegiatan Tahapan Pemilu (PN)
	6842.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		1	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	3.256.245.000	
	6842.QIC.001	Pengawasan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota		1	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	3.256.245.000	

UKE (Unit Kerja Eselon)	Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator Komponen Input	Volume / Target	Satuan	Pagu Anggaran TA. 2023	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Komponen Input :						
Provinsi		201	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	1	Laporan	37.500.000	
Provinsi		202	Pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab./Kota	1	Laporan	162.455.000	
Provinsi		203	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	1	Laporan	146.950.000	
Kabupaten/Kota		301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	9	Laporan	64.800.000	
Kabupaten/Kota		302	Pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab./Kota	9	Laporan	417.720.000	
Kabupaten/Kota		303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	9	Laporan	701.700.000	
Kecamatan		401	Pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kecamatan)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab./Kota	111	Laporan	1.725.120.000	
	6842.QCE	Penanganan Perkara		1	Perkara, Berkas Perkara	1.936.870.000		
	6842.QCE.001	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota		1	Perkara, Berkas Perkara	1.936.870.000		
		Komponen Input :						
Provinsi		201	Pengelolaan data penanganan pelanggaran pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	1	Berkas Perkara	36.500.000	
Provinsi		202	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	1	Perkara	158.210.000	
Provinsi		203	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	1	Perkara	41.420.000	
Kabupaten/Kota		301	Pengelolaan data penanganan pelanggaran pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	9	Berkas Perkara	396.200.000	
Kabupaten/Kota		302	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	9	Perkara	574.280.000	
Kabupaten/Kota		303	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	9	Perkara	730.260.000	
	115.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN				26.165.890.000		
	6849	PENGELOLAAN KEUANGAN, BMN, DAN UMUM				25.066.416.000		
	6849.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		2	Layanan, Laporan, Dokumen	22.363.007.000		
	6849.EBA.956	Layanan BMN		1	Layanan, Laporan, Dokumen	270.370.000		
		Komponen Input :						
Provinsi		201	Pembinaan dan pengelolaan BMN Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan pembinaan dan pengelolaan BMN yang sesuai dengan ketentuan	1	Laporan	70.000.000	1. Laporan inventarisasi aset persemester 2. Laporan SIMAK BMN persemester 3. Laporan Pembinaan (bimtek) pengelolaan BMN 4. Laporan supervisi dan monitoring pengelolaan BMN ke Kab/Kota
Kab/kota		301	Pengelolaan BMN Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan inventarisasi aset	9	Laporan	200.370.000	Semesteran

UKE (Unit Kerja Eselon)	Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator Komponen Input	Volume / Target	Satuan	Pagu Anggaran TA. 2023	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	6849.EBA.994	Layanan Perkantoran		1	Layanan, Laporan, Dokumen	22.092.637.000	
		Komponen Input :					
Provinsi/Kab/kota		001 Gaji dan tunjangan	Persentase penyelesaian pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu	10	Layanan	9.681.551.000	
Provinsi/Kab/kota		002 Operasional dan pemeliharaan kantor	Persentase penyelesaian pembayaran gaji pegawai kontrak yang tepat waktu	10	Layanan	12.411.086.000	
	6849.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		134	Unit, M2, Paket	1.602.000.000	
	6849.EBB.951	Layanan Sarana Internal		131	Unit, M2, Paket	1.067.000.000	
		Komponen Input :					
Provinsi		202 Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Bawaslu Provinsi	Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	11	Unit	155.000.000	
Provinsi		203 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Bawaslu Provinsi	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	3	Unit	10.000.000	
Kab/kota		302 Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	67	Unit	693.000.000	
Kab/kota		303 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	50	Unit	209.000.000	
	6849.EBB.971	Layanan Prasarana Internal		3	Unit, M2, Paket	535.000.000	
		Komponen Input :					
Provinsi		201 Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan Bawaslu Provinsi	Jumlah pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan	0	Unit	0	
Kab/kota		301 Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan	3	Unit	535.000.000	
	6849.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		4	Dokumen, Layanan, Laporan	1.101.409.000	
	6849.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		1	Dokumen, Layanan, Laporan	243.705.000	
		Komponen Input :					
Provinsi		201 Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran	1	Dokumen	72.535.000	1. Dokumen Renja dan Renja Perubahan 2. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKAKL) dan revisi anggaran
Kab/kota		301 Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran	9	Dokumen	171.170.000	
	6849.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		1	Dokumen, Layanan, Laporan	188.099.000	
		Komponen Input :					
Provinsi		201 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program	1	Dokumen	82.369.000	1. Dokumen SAKIP (Renstra, RKT, Perjanjian Kinerja dan perjanjian kinerja perubahan, Rencana Aksi, LKIP, SK- IKU) 2. Laporan Rencana Penyerapan Anggaran per triwulan 3. Laporan evaluasi kesesuaian pelaksanaan kinerja sesuai dengan rencana aksi, RKA, dan dokumen perencanaan lainnya 4. Laporan supervisi dan monitoring pelaksanaan program ke Kab/Kota
Kab/kota		301 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program	9	Dokumen	105.730.000	
	6849.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan		1	Dokumen, Layanan, Laporan	432.915.000	
		Komponen Input :					
Provinsi		201 Pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan	1	Dokumen	241.288.000	1. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bendahara pengeluaran bulanan 2. Laporan keuangan semesteran
Kab/kota		301 Pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan	9	Dokumen	191.627.000	Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bendahara pengeluaran pembantu bulanan
	6849.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan Bawaslu		1	Dokumen, Layanan, Laporan	236.690.000	
		Komponen Input :					

UKE (Unit Kerja Eselon)	Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator Komponen Input	Volume / Target	Satuan	Pagu Anggaran TA. 2023	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
Provinsi		201 Pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan	1	Dokumen	40.000.000	
Kab/kota		301 Pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan	9	Dokumen	196.690.000	
	6850	PENGLOLAAN ORGANISASI DAN SDM				596.332.000	
	6850.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		3	Layanan, Laporan, Dokumen	424.690.000	
	6850.EBA.957	Layanan Hukum		1	Layanan, Laporan, Dokumen	196.890.000	
		Komponen Input :					
Provinsi		201 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum di Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum yang diselenggarakan sesuai ketentuan	1	Laporan	22.110.000	1. laporan hasil evaluasi pelaksanaan produk hukum 2. Laporan supervisi dan monitoring evaluasi pelaksanaan produk hukum ke Kab/Kota
Provinsi		202 Diseminasi produk hukum di Bawaslu Provinsi	Laporan diseminasi produk hukum terkait kepemiluan	1	Laporan	23.430.000	
Provinsi		203 Kajian hukum di Bawaslu Provinsi	Laporan kajian hukum	1	Laporan	26.450.000	Kajian untuk produk hukum dan non produk hukum
Kab/kota		301 Fasilitasi pengelolaan layanan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan produk hukum dan layanan hukum	9	Laporan	105.730.000	
Kab/kota		302 Kajian hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	Laporan kajian hukum	9	Laporan	19.170.000	Kajian untuk produk hukum dan non produk hukum
	6850.EBA.962	Layanan Umum		1	Layanan, Laporan, Dokumen	155.730.000	
		Komponen Input :					
Provinsi		201 Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Provinsi		1	Laporan	50.000.000	Kegiatan Ketua Provinsi
Kab/kota		301 Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota		1	Laporan	105.730.000	Kegiatan Ketua Kab/Kota
	6850.EBA.969	Layanan Bantuan Hukum		1	Layanan, Laporan, Dokumen	72.070.000	
		Komponen Input :					
Provinsi		201 Pendampingan dan layanan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan advokasi pelanggaran dan pidana pemilu/pemilihan yang diselenggarakan sesuai ketentuan	1	Laporan	26.450.000	
Provinsi		202 Pembinaan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan pembinaan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi	1	Laporan	26.450.000	Pelatihan, Sosialisasi, peningkatan kapasitas, jasa konsultan, penyelesaian kasus hukum
Kab/kota		301 Bantuan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan advokasi pelanggaran dan pidana pemilu/pemilihan yang diselenggarakan sesuai ketentuan	9	Laporan	19.170.000	Hanya paket jasa konsultan (advokat)
	6850.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal		230	Orang, Layanan	171.642.000	
	6850.EBC.954	Layanan Manajemen SDM		230	Orang, Layanan	171.642.000	
		Komponen Input :					
Provinsi		201 Pembinaan SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Provinsi	Jumlah aparat pengawas dan sekretariat yang dilakukan pembinaan	1	Orang	50.000.000	Seluruh pegawai provinsi
Kab/kota		301 Manajemen SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah aparat pengawas dan sekretariat yang dilakukan pembinaan	9	Orang	121.642.000	Seluruh pegawai kabupaten/kota
	4355	PEMERIKSAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN INTERNAL				178.182.000	
	4355.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		1	Dokumen, Layanan, Laporan	178.182.000	
	4355.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja		1	Dokumen, Layanan, Laporan	178.182.000	
		Komponen Input :					
Provinsi		201 Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen LHKPN/LHKASN, penyusunan dan implementasi SOP, zona integritas, dan survey kepuasan layanan	1	Dokumen	72.452.000	

UKE (Unit Kerja Eselon)	Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator Komponen Input	Volume / Target	Satuan	Pagu Anggaran TA. 2023	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
Kab/kota		301 Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen LHKPN/LHKASN, penyusunan dan implementasi SOP, zona integritas, dan survey kepuasan layanan	9	Dokumen	105.730.000	
	4356	PENGLOLAAN DATA DAN INFORMASI				324.960.000	
	4356.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		2	Layanan, Laporan, Dokumen	324.960.000	
	4356.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Bawaslu		1	Layanan, Laporan, Dokumen	144.230.000	
		Komponen Input :					
Provinsi		201 Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi	1	Laporan	25.000.000	Keterbukaan informasi publik (Indikator IKU) 1. Laporan pengelolaan informasi yang dipublikasikan dalam mendukung keterbukaan informasi publik persemester 2. Laporan hasil evaluasi kehumasan meliputi peliputan dan dokumentasi 3. Laporan pengelolaan web Bawaslu provinsi 4. Laporan supervisi dan monitoring pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi ke Kab/Kota
Kab/kota		301 Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi	9	Laporan	119.230.000	1. Laporan pengelolaan informasi yang dipublikasi dalam mendukung keterbukaan informasi publik persemester 2. Laporan hasil evaluasi kehumasan meliputi peliputan dan dokumentasi 3. Laporan pengelolaan web Bawaslu Kab/Kota
	4356.EBA.963	Layanan Data dan Informasi		1	Layanan, Laporan, Dokumen	180.730.000	
		Komponen Input :					
Provinsi		201 Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Provinsi	Jumlah pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik yang tersedia	1	Laporan	75.000.000	1. Laporan pengelolaan dan pengembangan PPID persemester 2. Laporan supervisi dan monitoring pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik ke Kab/Kota
Kab/kota		301 Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengelolaan dan pengembangan PPID	9	Laporan	105.730.000	Semester
TOTAL						120.227.028.000	